

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2006-2010**

Lampiran I

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN		KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN							
				KEBIJAKAN	PROGRAM		2006	2007	2008	2009	2010			
							8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Menjadi Lembaga dan Aparat Pengawasan yang Profesional dan Kredibel untuk Mendorong terwujudnya Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik ( Good Governance )	1. Mendorong Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan tugas Pemerintahan dalam rangka Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kota Sukabumi dalam Wewujudkan Pelayanan prima bagi masyarakat Melalui Pengawasan Yang handal.	1.1. Meningkatkan Pengawasan terhadap penggunaan sumber daya dan output SKPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.	1.1.1. Ditindaklanjutinya Penyimpangan di - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan.	A. Memberikan fasilitasi bagi terlaksananya pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD.	A.1. Peningkatan Audit Operasional bidang Pemerintahan.	A.1.1. Audit Reguler Bidang Pemerintahan, ekgang dan bidang Aparatur / Trantib.	50	50	53	53	55			
							1.2. Meningkatkan Pengawasan terhadap pencapaian sasaran operasional SKPD	1.2.1 Ditindaklanjutinya Penyimpangan atas Kegiatan yang tidak mencapai sasaran.	B. Memberikan fasilitasi bagi terlaksananya pengawasan Operasional proyek-proyek pada unit kerja / instansi	B.1. Peningkatan Audit Operasional Pelaksanaan Proyek-proyek sesuai dengan target kinerja SKPD.	B.1.1. Efektivitas Pengawasan / Monitoring.	1	1	1
		2.1. Meningkatkan Pembinaan dan tindakan pencegahan penyimpangan anggaran dan operasi pada SKPD	2.1.1 Meningkatkan Pem - binaan dan tindakan pencegahan penyimpangan anggaran dan operasi pada SKPD.	C. Memberikan fasilitasi bagi terlaksananya Pengawasan bidang keuangan / BUMD pada SKPD.	C.1. Peningkatan Audit Operasional Bidang Keuangan dan BUMD.	B.1.2. Pemeriksaan / audit khusus atas kegiatan pemerintahan dan Pembangunan						1	1	1
							3. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan dan sarana Pengawasan dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pengawasan.	3.1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat pengawasan.	3.1.1 Meningkatkan kualitas Sumber daya aparat pengawasan.	D. Memberikan kesempatan kepada aparat pengawas untuk mengikuti Diklat Teknis di bidang Pengawasan.	D.1. Peningkatan kegiatan Diklat Aparat Pengawasan.	C.1.1. Audit Reguler Bidang Keuangan.	15	16
		D.1.1. Pelatihan Teknis Audit JFA.	C.1.2. Audit Reguler Bidang Pengelolaan APBS	2	2	2							2	2
			C.1.3 Monitoring PADS	1	1	1							1	1
	2. Mendorong Terciptanya Aparatur Pemerintah Kota yang bersih, Transparan dan Akuntabel serta meng - hargai partisipasi Masyarakat.	3.1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat pengawasan.	3.1.1 Meningkatkan kualitas Sumber daya aparat pengawasan.	D.1.1. Pelatihan Teknis Audit Atas LAKIP.	D.1.2. Bimbingan Teknis Fraud Auditing.	D.1.3. Bimbingan Teknis Audit Anggaran Berbasis Kinerja / Audit Kinerja.	D.1.4. Bimbingan Teknis Audit Manajemen Proyek.	C.1.4. Audit atas Pengelolaan APBS SMP/SMA/SMK Negeri	1	1	1	1	1	
								D.1.1. Pelatihan Teknis Audit JFA.	3	3	4	2	2	
								D.1.2. Bimbingan Teknis Audit Atas LAKIP.	1	-	-	-	-	
								D.1.3. Bimbingan Teknis Fraud Auditing.	-	1	-	-	-	
								D.1.4. Bimbingan Teknis Audit Anggaran Berbasis Kinerja / Audit Kinerja.	1	-	-	-	-	
								D.1.5. Bimbingan Teknis Audit Manajemen Proyek.	1	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						D.1.6. Bimbingan Teknis Penanganan TP.TGR	-	-	1	-	-
						D.1.7. Bimbingan Teknis Audit Investigasi.	-	-	1	-	-
						D.1.8. Bimbingan Teknis Audit Analisis Beban Kerja.	-	-	-	1	-
						D.1.9. Bimbingan Teknis Audit Pengadaan Barang dan jasa.	1	-	-	-	-
		3.2. Meningkatkan Kualitas Sarana Pengawasan	3.2.1. Terwujudnya Pengelolaan data elektronik pada lembaga sebanyak 8 unit Komputer dan 1 unit LCD.	E. Memberikan fasilitasi bagi terlaksananya peningkatan kualitas sarana kegiatan Aparat Pengawasan.	E.1. Peningkatan Sarana Pengawasan.	E.1.1. Mengusulkan Pengadaan Komputer 8 Unit.	2	2	2	1	1
						E.1.2. Mengusulkan Pengadaan 1 unit LCD.	-	1	-	-	1
			3.2.2. Meningkatkan sarana Kantor sebanyak 8 unit filling cabinet dan sarana Transportasi roda dua sebanyak 6 unit dan roda empat sebanyak dua unit dan sarana lainnya.			E.2.1. Mengusulkan Pengadaan 8 Unit Filling Kabinet.	2	2	2	1	1
						E.2.2. Mengusulkan sarana transportasi Roda 2 sebanyak 6 unit dan roda 2 sebanyak 2 unit.	R2 1	2	2	1	1
						E.1.3. Menyusun Daftar Materi Audit.	R4 -	1	1	-	1
			3.2.3. Terwujudnya petunjuk operasional sebanyak 1 jenis.				1	-	-	-	1
		3.3. Meningkatkan Efektivitas Peran serta Aparat Pengawasan.	3.3.1. Meningkatkan Efektivitas dan kualitas temuan hasil Audit yang Ditindaklanjuti.	F. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Aparat Pengawas untuk lebih produktif dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan.	F.1. Peningkatan peran serta Aparatur Pengawasan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan/ Pembinaan.	F.1.1. Mengadakan Gelar Pengawasan Daerah.	1	1	1	1	1
						F.1.2. Tindaklanjuti dan Pemutakhiran data hasil audit reguler APFP.	1	1	1	1	1
						F.1.3. Melaksanakan Kegiatan Pendistribusian dan Pengumpulan LP2P.	1	1	1	1	1
						F.1.4. Evaluasi LAKIP SKPD.	-	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat bidang pengawasan dengan melakukan pemberantasan praktek - praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.	4.1. Meningkatkan efektivitas peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan dan pembangunan.	4.1.1. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan yang bersumber dari pengaduan.	G. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan.	G.1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengawasan.	G.1.1. Penanganan Kasus-kasus atas pengaduan masyarakat, DPR dan Mass Media.	1	1	1	1	1

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
TAHUN 2009**

Instansi : INSPEKTORAT KOTA SUKABUMI

Lampiran IV

Sasaran	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian ( Target )	Realisasi	% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket	
1	2		3	4	5	6	
1	Tercapainya jumlah Aparat Pengawas yang mempunyai kemampuan di Bidang Pengawasan.	Aparatur Pengawasan yang berkualifikasi Auditor	%	60	60	100%	
2	Peningkatan Pembinaan Kepada Aparatur Pemerintah Kota Sukabumi dalam Pelaksanaan Pelayanan Prima (Service Of Excellent) kepada seluruh masyarakat.	Jumlah OPD yang dibina dan diawasi sampai dengan 100% di Tahun 2013	%	80	80	100%	
3	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Bebas dari Unsur KKN serta Taat terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.	Kasus Indikasi KKN yang ditangani	%	100	100	100%	
4	Penggunaan Anggaran Yang Transparan dengan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat.	Prosentase Realisasi Pembangunan sampai dengan 100% di Tahun 2013	%	80	80	100%	

1	2		3	4	5	6	
5	Ditindaklanjutinya	Jumlah LHP yang Ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh LHP	LHP	33	34	103%	

	Penyimpangan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Masyarakat.		%	100	100	100%	
6	Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti.	LHP yang dimanfaatkan oleh Pengambil Keputusan sampai dengan 100% di Tahun 2013	%	90	90	100%	
7	Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pengawasan yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat.	Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat yang dimanfaatkan oleh Pengambil Keputusan sampai dengan 100% di Tahun 2013	%	75	75	100%	
8	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Ekonomis, Berkualitas sesuai dengan anggaran yang tersedia.	Dipenuhinya Sarana dan Prasarana Kebutuhan Bidang Pengawasan	%	72	72	100%	
9	Perangkat Kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.	Dipenuhinya perangkat kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.	%	72	72	100%	
10	Tercapainya Aparatur Inspektorat yang memahami dan Mentaati Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana.	Aparatur yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	33	1	3.03%	

1	2		3	4	5	6



1	2		3	4	5	6

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TAHUN 2009**

Lampiran III

PROGRAM	Kegiatan				Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian ( Target )	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian ( Target )			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi	Input : Dana	Rupiah	Rp18,728,000	Rp18,553,000	99.07%	
		Output : Terlaksananya Kormonev tentang Pemberantasan Korupsi sesuai Inpres No. 5 Tahun 2004	%	75	75	100%	
		Outcome : Menurunnya penyimpangan yang berindikasi Korupsi	%	75	75	100%	
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara berkala	Input : Dana	Rupiah	Rp779,051,000	Rp775,986,000	100%	
		SDM	Orang	24	24	100%	
		Output : LHA	Buah	33	34	103%	
	Outcome : Ditindaklanjuti Hasil Temuan Pemeriksaan	%	100	100	100%		
	Penanganan Kasus pada pemerintah di Bawahnya	Input : Dana	Rupiah	Rp28,083,000	Rp15,879,500	57%	
		SDM	Orang	14	14	100%	
		Output : Terlaksananya Audit Khusus	kasus	12	9	75%	
	Outcome : Terelesaikannya kasus-kasus yang perlu penanganan	%	100	100	100%		
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Input : Dana	Rupiah	Rp122,606,000	Rp121,991,000	99.50%	
SDM		Orang	12	12	100%		
Output : Terelesaikannya Tindaklanjuti hasil temuan Pengawasan APFP		%	75	75	100%		
Outcome : Dgunakannya Laporan Tindak lanjut hasil Pengawasan oleh Inspektorat untuk kegiatan pengawasan		Buku %	12 100	12 100	100% 100%		



	2	3	4	5	6	7	8
	Evaluasi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Input : Dana SDM Output : - Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Lakip (8 SKPD) - Tersedianya Buku Petunjuk Teknis Evaluasi Lakip Outcome : - Terbitnya LHE Lakip - Digunakannya Buku Petunjuk Teknis Lakip oleh Evaluator dalam melaksanakan Evaluasi Lakip.	Rupiah Orang Kali Buku LHE %	Rp68,114,000 14 1 30 6 100	Rp68,114,000 14 1 30 6% 100	100% 100% 100% 100% 100%	-
2.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi Lakip) Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Pelatihan Teknis Evaluasi Lakip Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparat Pengawas dalam bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas Kinerja.	Rupiah Orang Kegiatan %	Rp144,999,000 26 1 75	Rp126,264,000 26 1 75	87.08% 100% 100% 100%	-
3.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penyusunan Sistem Jaringan Informasi Layanan Publik (SIM Evaluasi dan Pelaporan) Input : Dana Output : Tersedianya <i>Software</i> SIM Evaluasi & Pelaporan Outcome : Tersedianya Data Base Hasil Temuan Inspektorat pada SIM Evaluasi & Pelaporan.	Rupiah Unit %	Rp112,624,000 1 100	Rp111,111,000 1 100	98.66% 100% 100%	-

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
TAHUN ANGGARAN 2009

INSTANSI : INSPEKTORAT KOTA SUKABUMI

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah & Sistem Adm. Daerah Sehingga tercipta Pelaksanaan Pemerintahan yang Akuntabel & Transparan	Kasus Indikasi KKN yang Merugikan Keuangan Daerah/Negara yang Ditangani		11 75		Prosentase Jumlah Temuan Prosentase Jumlah OPD yang Dibina
Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan dalam rangka pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Adm.Daerah	Aparatur Pengawasan yang Berkualifikasi Auditor		30	100	
Terwujudnya Penggunaan Anggaran yang Transparan dengan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat	Keandalan Sistem Pengendalian Laporan Keuangan OPD		45	100	
Ditindaklanjutinya Penyimpangan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan	Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan		67		

Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Temuan Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	Hasil Temuan Pengawasan yang dimanfaatkan oleh Pengambil Keputusan	100
Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pengawasan yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat	Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat yang Dimanfaatkan oleh Pengambil Keputusan	80
Terpenuhinya Standar Operasional Pengawasan dalam Kegiatan Pengawasan	Juklak dan Juknis Pengawasan	80
Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Sarana & Prasarana yang Ekonomis, Berkualitas sesuai dengan Prosedur & Anggaran yang Tersedia	Dipenuhinya Sarana dan Prasarana samapai dengan 100% di tahun 2013	72
Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	Dipenuhinya Perangkat Kerja yang Dibutuhkan untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas	72